

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli. 1993. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta.
- Cecil, Andrew R. et.al. 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara*. Penerbit Nuansa Cendekia. Bandung.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Hamidi, Jazim, dkk. 2013. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kansil, CST. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Purwosutjipto, H. M. N. 2008. *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Djambatan. Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rasjidi, Lili, dkk. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya. Bandung.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan–Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

-----, dkk. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tim Redaksi. 2019. *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Laksana. Yogyakarta.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

B. Karya Ilmiah

Gondang Purwantoro Wardoyo, 2010, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi (Studi di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo)*”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Krisnadi Nasution, 2012, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya.

Nur Ikhsan Hasanuddin, 2013, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Restitusi Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa*”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.

Ratna Dewi, dkk, 2017, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*” *Syiah Kuala Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.

Zainal Fikri Nasution, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan kota Medan)*”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Medan.

C. Website

BelajarSipil.com “Pengertian Angkutan Umum” <https://www.belajarsipil.com/2014/01/16/pengertian-angkutan-umum/>, diakses Selasa, tanggal 9 Juli 2019, pukul 22.15 WIB.

Dictio “Hak-Hak Korban Berdasarkan Hukum Di Indonesia” <https://www.dictio.id/t/apa-saja-hak-hak-korban-berdasarkan-hukum-di-indonesia/14758>, diakses Selasa, tanggal 9 Juli 2019 pukul 20.32 WIB.

Jasa Raharja, “Lingkup Jaminan, dari <https://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan>, diakses Sabtu, tanggal 3 Agustus 2019, pukul 15.00 WIB.

LBH Jakarta, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya” <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/>, diakses Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 22.05 WIB.

Ray Pratama Siadari, “Teori Perlindungan Hukum”, <http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses Minggu, tanggal 7 Juli 2019, pukul 20.00 WIB.

Tugas Sekolah “Jenis Angkutan Umum Di Indonesia” <http://yaleztha.blogspot.com/2016/02/jenis-angkutan-umum-di-indonesia.html>, diakses Selasa, tanggal 9 Juli 2019, pukul 23.00 WIB.

Wikipedia, “Penelitian Eksplanatori” https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksplanatori, diakses Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 23.37 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, Dan Udara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

